

Implementasi Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis sebagai Pendorong dan Pembangunan Ekonomi Lokal

Raihan A. Hanasi¹, Izzatunnisa Akuba^{2*}, Israh Miranti Wahab³, Cipta Monoarfa⁴,
Muhajir Riza M. Ahmad⁵, Alya Putri Pantoioyo⁶

¹⁻⁶Administrasi Publik, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Email: raihan@ung.ac.id¹, Izzatunnisa@gmail.com^{2*}, isramirantiwahab@gmail.com³,
ciptamonoarfa@gmail.com⁴, rizaahmadmuhajir@gmail.com⁵, alyaputripantoioyo11@gmail.com⁶

*Penulis Korespondensi: Izzatunnisaakuba@gmail.com²

Abstract. *This study discusses the implementation of the Free Nutritious Meal Program (MBG) and its impact on local economic development. Using a literature review method, the research examines various sources discussing the effectiveness of the MBG program, operational challenges, and its contribution to the community. The study findings show that the success of MBG is influenced by several factors, including the stability of local food supplies, clarity of standard operating procedures (SOP), and the commitment of implementers at the school and regional government levels. This program has proven to stimulate the local economy by increasing the demand for local agricultural commodities, involving catering SMEs, and creating a multiplier effect that strengthens economic activities in the community. Additionally, MBG can increase the purchasing power of local communities and open up job opportunities in the food and distribution sectors. However, the implementation of MBG still faces challenges such as fragmented authority among institutions, limited infrastructure, and regional capacity variations. Overall, this program has dual potential as both a nutritional improvement effort and a local economic empowerment tool. To optimize MBG, strong coordination between central and local governments and implementers on the ground is essential. With adequate institutional readiness, MBG can become an effective instrument for regional development and local economic strengthening.*

Keywords: *Economic Empowerment; Free Nutritious Meal; Local Economy; Policy Implementation; Regional Development.*

Abstrak. Penelitian ini membahas implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi lokal. Melalui metode studi literatur, penelitian ini meninjau berbagai sumber yang membahas efektivitas pelaksanaan MBG, tantangan operasional, serta kontribusinya bagi masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan MBG dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain stabilitas pasokan pangan lokal, kejelasan standar operasional prosedur (SOP), serta komitmen pelaksana di tingkat sekolah dan dinas daerah. Program ini terbukti mendorong ekonomi lokal dengan meningkatkan permintaan terhadap komoditas pertanian lokal, pelibatan UMKM catering, serta terciptanya efek pengganda yang memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Selain itu, MBG juga dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan membuka peluang kerja di sektor pangan dan distribusi. Meskipun demikian, pelaksanaan MBG masih menghadapi berbagai kendala seperti fragmentasi kewenangan antar lembaga, keterbatasan infrastruktur, dan variasi kapasitas antar daerah. Secara keseluruhan, program ini memiliki potensi ganda sebagai upaya peningkatan gizi masyarakat sekaligus pemberdayaan ekonomi lokal. Agar MBG dapat berjalan optimal, dukungan koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaksana di lapangan sangat diperlukan. Dengan kesiapan kelembagaan yang baik, MBG dapat menjadi instrumen efektif untuk pembangunan daerah dan penguatan ekonomi lokal.

Kata Kunci: Ekonomi Lokal; Implementasi Kebijakan; Makan Bergizi Gratis; Pembangunan Daerah; Pemberdayaan Ekonomi.

1. LATAR BELAKANG

Sejumlah daerah di Indonesia masih menghadapi kombinasi serius antara tingkat pengangguran dan kemiskinan yang tinggi serta keterbatasan akses pangan bergizi. Misalnya, penelitian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menemukan bahwa tingkat pengangguran

memberikan pengaruh yang positif terhadap kemiskinan serta disparitas pendapatan (Anfa & Bintariningtyas, 2024). Di sisi lain, di Desa Girimulyo, Kabupaten Malang ditemukan bahwa aksesibilitas pangan baik secara fisik maupun ekonomi masih menjadi hambatan utama bagi rumah tangga pedesaan (Hidayat, 2025). Kondisi tersebut menegaskan bahwa masalah ekonomi seperti pengangguran dan kemiskinan tidak cukup diatasi melalui kebijakan ekonomi makro saja, melainkan memerlukan pendekatan lintas-sektor yang mengintegrasikan kebijakan sosial, agar pada saat yang sama meningkatkan ketahanan gizi dan mendorong penyerapan tenaga kerja lokal.

Untuk menanggapi berbagai tantangan tersebut, pemerintah memperkenalkan Program Makan Bergizi Gratis. Kebijakan nasional ini menjadi salah satu program strategis yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan gizi bagi anak-anak usia sekolah bertujuan untuk menangani masalah gizi yang kurang baik, memperbaiki mutu sumber daya manusia serta meminimalkan tekanan finansial pada rumah tangga yang kurang mampu (Basit & Ramadani, 2025). Kebijakan ini sejalan dengan agenda pembangunan nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, yang menekankan pentingnya peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat sebagai fondasi pembangunan manusia. Sebagai bagian dari kebijakan nasional, Makan Bergizi Gratis memiliki relevansi ekonomi yang signifikan. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan memenuhi hak gizi anak-anak, tetapi juga menjadi instrumen penggerak ekonomi lokal (Widyasari et al., 2025).

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi menjadi stimulus ekonomi lokal melalui peningkatan permintaan terhadap produk pertanian, penguatan rantai pasok pangan, serta keterlibatan pelaku UMKM sebagai penyedia bahan baku dan jasa katering. Pelaksanaan kebijakan ini dapat meningkatkan permintaan bahan pangan lokal sehingga mendorong pertumbuhan sektor pertanian di daerah. Kenaikan permintaan tersebut berpotensi menaikkan harga produk petani dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal secara keseluruhan (Andriyanty et al., 2025). penelitian oleh (Basit & Ramadani, 2025) menemukan bahwa Makan Bergizi Gratis memberi “efek berganda (multiplier effect)” pada sektor pertanian maupun UMKM. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan ini tidak semata-mata berorientasi pada aspek sosial berupa pemenuhan gizi, tetapi juga berpotensi menggerakkan perekonomian berbasis masyarakat melalui penguatan rantai produksi dan distribusi di tingkat lokal

Meskipun program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah dicanangkan sebagai langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan pemenuhan gizi anak sekolah, pelaksanaannya di tingkat daerah masih menghadapi berbagai tantangan operasional. Penelitian di Kabupaten

Serang menunjukkan bahwa kolaborasi antar pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat belum berjalan optimal sehingga menimbulkan gap antara kebijakan dan praktik lapangan (Nuradhawati, 2025). Tantangan lain meliputi distribusi pangan yang masih belum seimbang serta koordinasi yang belum berjalan secara optimal, dan keterbatasan sumber daya lokal yang dapat mendukung program secara berkelanjutan (Agustini, 2025). Kondisi ini menunjukkan perlunya penelitian yang menelaah tidak hanya aspek implementasi kebijakan, tetapi juga bagaimana program tersebut dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi lokal.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana implementasi program Makan Bergizi Gratis berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi lokal. Kebijakan MBG tidak terbatas pada upaya meningkatkan status gizi peserta didik, namun sekaligus memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan melibatkan aktor-aktor ekonomi lokal dalam rantai pasok bahan makanan, kebijakan ini menciptakan efek berganda yang mendorong penguatan ekonomi komunitas sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Makan Bergizi Gratis berperan sebagai pendorong pembangunan ekonomi lokal, Mengkaji keterlibatan pelaku ekonomi lokal seperti petani, nelayan, dan pelaku UMKM dalam rantai pasok pelaksanaan kebijakan MBG, serta kontribusi kebijakan MBG terhadap peningkatan aktivitas ekonomi lokal, terutama dalam menciptakan peluang usaha baru dan penyerapan tenaga kerja lokal. penelitian ini diharapkan mampu memberikan nilai tambah pengetahuan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi kebijakan berbasis kesejahteraan masyarakat dan ketahanan ekonomi lokal.

2. KAJIAN TEORITIS

Bagian pembahasan ini mencakup sejumlah konsep yang relevan dengan implementasi kebijakan publik, konsep program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan teori pembangunan ekonomi lokal yang menjadi dasar pemikiran penelitian ini. Di samping itu, bagian ini turut mengulas berbagai temuan penelitian terdahulu yang relevan dan menjadi dasar ilmiah bagi pelaksanaan penelitian ini

Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan langkah penting pada rangkaian proses kebijakan publik yang berfungsi menerjemahkan keputusan atau pedoman dasar menjadi implementasi konkret melalui program, prosedur, dan aktivitas operasional. Secara etimologis, implementasi berarti menyediakan sarana untuk menjalankan keputusan serta menimbulkan dampak tertentu.

Implementasi dipahami sebagai proses pelaksanaan keputusan publik baik dalam bentuk regulasi, keputusan eksekutif, maupun petunjuk teknis dan dilakukan setelah kebijakan dirumuskan secara jelas (Maharaksa et al., 2025). Van Meter dan Van Horn melihat implementasi sebagai aktivitas lanjutan yang mengubah keputusan menjadi tindakan operasional oleh organisasi publik dalam periode tertentu. Implementasi juga merupakan upaya eksekusi kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik, di mana manfaat kebijakan baru terlihat setelah dijalankan, namun dalam praktiknya sering menghadapi hambatan seperti resistensi masyarakat, ketidakselarasan kepentingan, dan kendala kelembagaan (Joko Pramono, 2020). Dengan demikian, implementasi kebijakan dapat dimaknai sebagai proses nyata untuk mewujudkan tujuan kebijakan melalui tindakan sistematis di lapangan.

Edward III menyatakan bahwa efektivitas implementasi kebijakan ditentukan oleh empat faktor kunci yang saling berkaitan, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi mencakup bagaimana kebijakan ditransmisikan, seberapa jelas tujuan dan instruksi kebijakan, dan konsistensi pesan kepada pelaksana untuk menghindari distorsi dalam pemahaman (Sunarto, 2021). Sumber daya meliputi personel (staf), kewenangan, fasilitas fisik, informasi, dan anggaran yang cukup agar kebijakan dapat dijalankan secara efektif. Disposisi berkaitan dengan sikap dan motivasi para pelaksana: komitmen, kejujuran, serta insentif yang mendorong mereka untuk melaksanakan kebijakan sesuai tujuan. Terakhir, struktur birokrasi mencakup mekanisme kerja organisasi, prosedur operasi (SOP), dan fragmentasi tanggung jawab antar unit; struktur yang efektif (fleksibel, terkoordinasi) sangat penting agar sumber daya dan komunikasi dapat digunakan sebaik mungkin dan mencegah hambatan administratif (Zahara et al., 2024).

Model implementasi kebijakan yang paling relevan untuk menganalisis kebijakan MBG adalah model George C. Edwards III, sebab model ini menggarisbawahi empat variabel penting komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang berperan besar dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program sosial. berskala nasional (Sunarto, 2021). Dalam model ini, komunikasi yang efektif diperlukan agar pesan dan prosedur pelaksanaan MBG dapat dipahami secara konsisten oleh sekolah, pemerintah daerah, serta penyedia bahan pangan. Sumber daya seperti anggaran, tenaga pelaksana, data sasaran, dan sarana distribusi pangan memegang peran penting dalam memastikan makanan bergizi tersalurkan tepat waktu dan tepat sasaran. Disposisi atau sikap pelaksana menjadi faktor penentu karena keberhasilan MBG sangat dipengaruhi oleh komitmen sekolah, dinas pendidikan, dan pemerintah daerah dalam menjalankan prosedur sesuai tujuan kebijakan. Selain itu, struktur birokrasi yang jelas

dan terkoordinasi diperlukan untuk menyederhanakan alur kerja, mengurangi hambatan administratif, dan memastikan koordinasi antar sektor berlangsung optimal dalam implementasi MBG (Zahara et al., 2024)

Konsep Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) lahir sebagai bagian dari intervensi strategis pemerintah guna menurunkan prevalensi stunting sebagai fondasi pembangunan manusia dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, karena program ini dipandang mampu memperkuat kualitas sumber daya manusia sejak usia sekolah. Dalam kajiannya, Lendra, Husni, dan Fitriani menyatakan bahwa MBG merupakan “intervensi strategis pemerintah Indonesia untuk menanggulangi masalah gizi kronis, seperti stunting” serta memberikan dukungan bagi pendidikan anak-anak usia sekolah. Mereka juga menunjukkan bahwa program ini mencerminkan nilai akuntabilitas dan responsivitas pemerintah terhadap tantangan gizi nasional (Wayan Lendra, 2025).

Salah satu sasaran pokok dari program MBG ialah meningkatkan kondisi gizi peserta didik serta memperkuat mutu sumber daya manusia melalui penyediaan makanan bergizi di lingkungan sekolah. Dalam kajian Agustini & Mulyani, dijelaskan bahwa “Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia dirancang untuk mengatasi permasalahan gizi buruk dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju visi Indonesia Emas 2045” (Agustini, 2025). Selain itu, penelitian tersebut menemukan bahwa program ini mendorong kehadiran murid di sekolah, konsentrasi belajar, dan capaian akademik sebagai dampak pendidikan.

Prinsip pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menekankan pentingnya pemberdayaan lokal, yaitu pemanfaatan produk pangan dari petani, UMKM, dan pemasok daerah untuk memperkuat ekonomi lokal sekaligus memastikan ketersediaan bahan yang segar dan terjangkau (Agustini, 2025). Program ini juga mengutamakan partisipasi masyarakat melalui pelibatan komite sekolah, orang tua, dan komunitas dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan kualitas makanan agar pelaksanaan lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Selain itu, transparansi dijunjung tinggi dengan penyediaan informasi terbuka terkait pembiayaan, mekanisme pengadaan, dan distribusi makanan guna mencegah penyalahgunaan serta meningkatkan kepercayaan publik. Prinsip keberlanjutan diwujudkan melalui integrasi program ini ke dalam rencana pembangunan daerah dan penguatan kapasitas lembaga pelaksana sehingga MBG dapat berjalan konsisten, tidak hanya sebagai program jangka pendek tetapi menjadi bagian dari upaya perbaikan gizi dan penguatan kualitas SDM yang dilakukan secara berkelanjutan.

Program MBG menjadi instrumen strategis pembangunan daerah karena melibatkan dimensi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi lokal secara bersamaan: memperbaiki gizi anak, meningkatkan kehadiran sekolah, dan memberdayakan rantai suplai pangan lokal. Dalam studi kritis Albaburrahim et al., disebutkan bahwa MBG dapat menjadi “transformasi pendidikan Indonesia menuju Generasi Emas 2045” karena program ini berpotensi memperkuat SDM daerah melalui intervensi gizi di lembaga pendidikan (Albaburrahim et al., 2025).

Teori Pembangunan Ekonomi Lokal

Menurut Edward J. Blakely, pengembangan ekonomi lokal adalah suatu proses ketika pemerintah daerah bekerja sama dengan masyarakat serta sektor swasta memanfaatkan potensi lokal yang mencakup sumber daya manusia, alam, serta kelembagaan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan komunitas lokal. Dari perspektif Michael P. Todaro, pembangunan ekonomi menekankan pentingnya pengurangan kemiskinan dan ketimpangan melalui pertumbuhan yang inklusif, di mana pembangunan daerah (lokal) menjadi bagian dari strategi desentralisasi dan pembangunan berkelanjutan (Imaningsih, n.d.).

Sedangkan dari Mudrajat Kuncoro mendefinisikan pembangunan ekonomi lokal sebagai bagian dari pembangunan ekonomi daerah yang strategis, di mana pemerintah daerah dan masyarakat lokal harus mengambil peran aktif dalam merencanakan, mengelola, dan mengembangkan potensi lokal untuk mendorong terciptanya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkesinambungan (Moehaditoyo, n.d.). Dapat disimpulkan pembangunan ekonomi lokal proses pemanfaatan potensi daerah secara mandiri dan partisipatif untuk menciptakan pertumbuhan, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Prinsip pembangunan berbasis potensi daerah (*endogenous development*) menekankan bahwa kekuatan utama pembangunan ekonomi lokal bersumber dari kemampuan internal wilayah, seperti sumber daya manusia, institusi lokal, dan potensi fisik daerah, sehingga pembangunan tidak bergantung pada intervensi eksternal. Dalam *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, menjelaskan bahwa pendekatan pembangunan lokal harus memaksimalkan “potensi sumber daya manusia, ekonomi, dan lingkungan daerah sebagai penggerak pertumbuhan” (Fernia, 2025). Prinsip ini sejalan dengan temuan Irawan (2020) yang menegaskan bahwa *endogenous development* menekankan kreativitas lokal, pemanfaatan aset lokal, dan partisipasi masyarakat sebagai fondasi penguatan ekonomi berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan yang berangkat dari potensi internal daerah memungkinkan terciptanya struktur ekonomi yang lebih tangguh, adaptif, dan sesuai karakteristik wilayah.

Sejalan dengan prinsip pembangunan berbasis potensi daerah (*endogenous development*), pemerintah daerah berperan strategis sebagai fasilitator yang memastikan potensi internal wilayah dapat berkembang secara optimal melalui penciptaan iklim ekonomi lokal yang produktif. Pemerintah perlu menyediakan regulasi yang mendukung, membangun kelembagaan lokal, memperkuat kapasitas pelaku usaha, serta memfasilitasi kolaborasi antar-aktor ekonomi. Wijayanti & Darwanto (2024) menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat meningkatkan daya saing lokal melalui pembentukan klaster usaha, karena klaster memperkuat jejaring, inovasi, dan kapasitas produksi lokal (Wijayanti & Darwanto, 2024). Selain itu, Yusri (2020) menegaskan bahwa pemerintah daerah berperan sebagai “penggerak dan pembina” dalam pengembangan ekonomi lokal melalui pelatihan, pendampingan, dan penguatan institusi agar potensi ekonomi daerah dapat dioptimalkan secara berkelanjutan (Yusri, 2020). Dengan demikian, pemerintah daerah menjadi kunci dalam menghubungkan potensi lokal yang bersifat endogen dengan sistem ekonomi yang lebih produktif dan adaptif.

Dalam konteks pembangunan ekonomi lokal, sinergi antara kebijakan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah menjadi penting karena peran pemerintah daerah sebagai fasilitator tidak hanya terbatas pada penguatan kelembagaan dan klaster usaha, tetapi juga pada penyusunan kebijakan sosial-ekonomi yang saling mendukung. Kebijakan publik yang tepat, seperti peningkatan kapasitas SDM, pemberdayaan UMKM, dan penyediaan infrastruktur ekonomi, memungkinkan potensi lokal yang bersifat endogen dapat berkembang secara optimal dan produktif. pembangunan ekonomi lokal hanya dapat berjalan efektif apabila pemerintah menerapkan kebijakan yang mengintegrasikan pembinaan industri, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, dan penguatan institusi lokal (Yusri, 2020). Temuan ini didukung oleh penelitian (Fernia;, 2025), yang menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah yang fokus pada pengelolaan potensi lingkungan, ekonomi, dan komunitas lokal mampu memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Dengan demikian, kebijakan publik berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan potensi lokal, kapasitas kelembagaan, dan dinamika ekonomi sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif dan resilient.

Penelitian Terdahulu

Penelitian (Anfa & Bintariningtyas, 2024) menunjukkan bahwa tingginya tingkat pengangguran di DIY berkontribusi pada peningkatan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, sehingga intervensi sosial ekonomi, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, studi (Hidayat, 2025) menekankan keterbatasan akses fisik dan variasi pangan di rumah tangga pedesaan, meskipun bantuan sosial dan tradisi lokal membantu menjaga ketahanan pangan.

Temuan ini menegaskan bahwa MBG dapat berperan sebagai strategi intervensi yang memastikan kelompok rentan tetap memperoleh pangan bergizi sekaligus memberikan dampak sosial ekonomi positif.

Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) memberikan manfaat ganda, baik dari segi gizi anak maupun penguatan ekonomi lokal. Menurut (Basit & Ramadani, 2025), MBG berdampak positif pada sektor pertanian, UMKM, dan daya beli masyarakat melalui pemanfaatan bahan pangan lokal, sehingga selain meningkatkan status gizi anak, program ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui keterlibatan rantai pasok lokal. Senada dengan itu, (Agustini, 2025) menyatakan bahwa penerapan MBG di sekolah tidak hanya meningkatkan keaktifan siswa tetapi juga memberdayakan produsen lokal.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (library research) melalui peninjauan berbagai bahan tertulis seperti jurnal akademik, buku, laporan kebijakan, dan dokumen pemerintah yang relevan dengan topik implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan ekonomi lokal. Literatur diperoleh dari database jurnal online seperti Google Scholar dengan menggunakan kata kunci “*implementasi kebijakan*”, “*makan bergizi gratis*”, dan “*ekonomi lokal*.” Literatur yang dikaji dipilih berdasarkan tingkat relevansi, kemutakhiran (lima tahun terakhir), dan kredibilitas sumber.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan melalui metode studi literatur (library research) dengan penelusuran sistematis dengan rentang publikasi 2020–2025, khususnya yang membahas implementasi kebijakan publik, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan pembangunan ekonomi lokal. Literatur diperoleh dari database jurnal online seperti Google Scholar. Pemilihan sumber dilakukan berdasarkan tiga kriteria: (1) relevansi langsung dengan variabel penelitian, (2) aksesibilitas penuh dalam bentuk PDF, dan (3) kesesuaian tahun publikasi dengan standar mutakhir jurnal ilmiah.

Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG)

Hasil analisis dari berbagai literatur menunjukkan bahwa implementasi MBG telah berjalan secara bertahap di sejumlah daerah dengan dampak yang berbeda-beda, dipengaruhi oleh kapasitas pemerintah daerah, kualitas koordinasi, serta kesiapan infrastruktur pangan.

Efektivitas Pelaksanaan Program

Efektivitas implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sangat ditentukan oleh tiga faktor utama, yaitu ketersediaan bahan pangan lokal yang stabil, kematangan SOP distribusi dan penyajian, serta komitmen pelaksana di sekolah dan dinas daerah, sebagaimana dijelaskan dalam penelitian (Agustini, 2025). Ketiga faktor ini saling berhubungan dan memiliki implikasi langsung terhadap keberhasilan program MBG serta terhadap pembangunan ekonomi lokal sebagaimana dijelaskan dalam kajian teoritis

a. Ketersediaan Bahan Pangan Lokal Yang Stabil

Ketersediaan bahan pangan lokal merupakan penentu utama efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena program ini menuntut penyediaan bahan pangan segar setiap hari dengan jumlah yang stabil dan kualitas yang terjaga. Program ini membutuhkan kontinuitas suplai sayuran, buah, protein hewani, dan pangan pokok dalam volume besar dan terjadwal, sehingga ketidakstabilan pasokan dapat langsung mengganggu keberlanjutan penyusunan menu harian. Sejalan dengan itu, beberapa daerah dilaporkan mengalami fluktuasi ketersediaan bahan baku misalnya varietas sayur tertentu yang sulit diperoleh pada musim-musim tertentu atau ketersediaan daging dan ikan yang tidak selalu mencukupi yang menyebabkan sekolah melakukan perubahan menu mendadak, pengurangan porsi, atau melakukan pengadaan dari pemasok luar daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas program sangat bergantung pada kesiapan rantai pasok lokal sebagai tulang punggung pelaksanaan MBG (Basit & Ramadani, 2025).

Ketersediaan bahan pangan lokal yang stabil juga merupakan indikator penting dari penerapan prinsip pembangunan ekonomi berbasis potensi wilayah (endogenous development). Prinsip ini menekankan bahwa kekuatan pembangunan daerah berasal dari kemampuan lokal dalam menyediakan sumber daya, tenaga kerja, dan sistem ekonomi yang berkelanjutan. Ketika petani, nelayan, dan UMKM lokal menjadi pemasok utama bahan baku MBG, maka program tidak hanya berfungsi sebagai kebijakan gizi, tetapi juga sebagai mekanisme pemberdayaan ekonomi lokal. Hal ini sejalan dengan Fernia et al. (2025), yang menegaskan bahwa pemanfaatan sumber daya lokal dapat meningkatkan ketahanan ekonomi daerah karena memperpendek rantai pasok, mengurangi ketergantungan pada pemasok luar, dan memperkuat kapasitas produksi komunitas lokal.

b. Kematangan SOP Distribusi dan Penyajian

Efektivitas pelaksanaan MBG sangat dipengaruhi oleh standar operasional prosedur (SOP) dalam penyimpanan, distribusi, dan penyajian makanan, karena SOP menjadi pedoman utama yang memastikan bahwa seluruh proses penyediaan makanan berlangsung aman, higienis, tepat waktu, dan memenuhi standar gizi. MBG merupakan program dengan frekuensi pelaksanaan harian, sehingga ketidakjelasan atau ketidakkonsistenan SOP dapat langsung berdampak pada kualitas makanan yang diterima siswa. Agustini (2025) mencatat bahwa di beberapa daerah, perbedaan pemahaman terhadap SOP terutama dalam aspek penyimpanan bahan segar, pengolahan, serta prosedur distribusi mengakibatkan variasi kualitas makanan dan ketidakefisienan proses distribusi antara sekolah satu dengan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa SOP belum menjadi instrumen yang dipahami dan dijalankan secara seragam di berbagai wilayah.

Temuan Agustini tersebut diperkuat oleh (Rahmah et al., 2025), yang dalam penelitiannya menemukan bahwa sebagian sekolah belum memiliki SOP baku terkait higienitas, manajemen dapur, dan prosedur penerimaan bahan makanan. Ketidakteraturan SOP membuat kualitas makanan sulit dikontrol dan mengancam keberlanjutan standar gizi yang ditargetkan MBG. Penelitian ini juga mengungkap bahwa sekolah dengan fasilitas dapur terbatas sering mengabaikan salah satu tahapan prosedural seperti pencucian bahan berbasis air mengalir atau penggunaan alat masak khusus untuk makanan tertentu, sehingga standar kebersihan tidak terpenuhi secara maksimal.

Kematangan SOP bukan hanya sekadar aspek teknis pelaksanaan, tetapi merupakan representasi langsung dari peran pemerintah daerah dalam membangun kelembagaan yang produktif, sebagaimana dijelaskan dalam kajian teoritis. Dalam perspektif pembangunan ekonomi lokal (LED), pemerintah daerah bukan hanya berperan sebagai pembuat regulasi, melainkan juga sebagai fasilitator yang memiliki tanggung jawab memastikan kesiapan institusi lokal dalam menjalankan program strategis. SOP merupakan instrumen kelembagaan yang mengarahkan perilaku organisasi agar berjalan konsisten dan efektif.

c. Komitmen Pelaksanaan di Sekolah dan Dinas Daerah

Komitmen pelaksana di tingkat sekolah (kepala sekolah, guru, pengelola dapur) dan dinas daerah merupakan faktor penentu keberhasilan implementasi MBG, karena tanpa dedikasi dan konsistensi dari mereka, berbagai mekanisme seperti SOP, pemantauan, pelaporan, dan kualitas menu bisa terabaikan atau berjalan secara setengah hati. Dalam penelitian *Efektivitas dan Tantangan Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis* oleh

Agustini (2025), rendahnya komitmen dari dinas dan sekolah di beberapa wilayah diidentifikasi sebagai hambatan signifikan: pelaksanaan monitoring program sering tidak optimal, kualitas menu masih fluktuatif, dan laporan pelaksanaan program tidak selalu lengkap atau tepat waktu.

Dukungan empiris dari konteks lokal datang dari penelitian (Herniati & Idawati, 2025) dalam *Jurnal AURA*, yang menunjukkan bahwa di RA Al-Mansyuriah (usia dini), keberhasilan MBG sangat tergantung pada inisiatif kepala sekolah dan guru: mereka aktif memastikan bahwa anak-anak datang ke jam makan, pengelola dapur menjaga kebersihan, dan guru mengawasi proses makan bersama serta interaksi anak selama makan. Komitmen semacam ini tidak hanya meningkatkan kehadiran siswa, tetapi juga menumbuhkan iklim kepercayaan terhadap program, sehingga keberlanjutan MBG lebih terjamin.

Dari sudut kelembagaan lokal dan teori pembangunan ekonomi lokal (LED), komitmen pelaksana mencerminkan struktur kelembagaan yang sehat di tingkat lokal. Dalam teori LED, pemerintah daerah harus membangun kelembagaan lokal yang kuat yaitu institusi sekolah dan birokrasi dinas agar program-program pembangunan (termasuk kebijakan sosial seperti MBG) dapat dioperasikan dengan efektif dan responsif. Ketika para pelaksana di sekolah dan dinas mempunyai komitmen tinggi, mereka akan lebih adaptif terhadap tantangan lapangan, mengikuti SOP, dan menjaga kualitas layanan, yang selaras dengan argumentasi LED bahwa kelembagaan lokal pendorong utama pertumbuhan ekonomi lokal.

Lebih jauh, komitmen ini juga menjadi jembatan antara kebijakan publik dan pembangunan ekonomi lokal: pelaksana yang berdedikasi dapat memfasilitasi integrasi MBG dengan aktor lokal (petani, UMKM, komunitas), sehingga MBG tidak hanya program gizi tetapi juga instrumen pembangunan ekonomi lokal. Misalnya, pengelola sekolah yang komit menerapkan MBG dengan melibatkan usaha katering lokal menciptakan peluang bagi UMKM, **memperkuat rantai pasok lokal, dan** mendistribusikan manfaat ekonomi ke masyarakat lokal.

Tantangan Pelaksanaan

Berbagai literatur mengidentifikasi sejumlah tantangan signifikan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang bisa menghambat efektivitas dan keberlanjutan program:

a. Fragmentasi Kewenangan Antar Dinas

Tantangan utama yang dihadapi adalah fragmentasi kewenangan antar berbagai instansi terkait seperti dinas pendidikan, dinas kesehatan, serta dinas lokal yang menangani UMKM atau pengadaan pangan. Dalam studi kasus Provinsi Banten, (Rosidin et al., 2025) menemukan bahwa koordinasi antar instansi sangat lambat dan kurang sinergi, sehingga pengambilan keputusan distribusi makanan dan pengelolaan sumber daya lokal menjadi kurang efisien. Fragmentasi ini memperumit implementasi kebijakan karena setiap instansi memiliki prioritas, prosedur, dan anggaran sendiri, yang seringkali tidak sinkron. Kondisi ini memperlambat respon atas masalah logistik atau permintaan lokal dan menunjukkan bahwa meskipun kebijakan MBG bersifat nasional, pelaksanaannya sangat tergantung pada struktur pemerintahan daerah.

b. Perbedaan Kesiapan Infrastruktur

Infrastruktur fisik di daerah juga menjadi kendala besar. Beberapa wilayah, terutama daerah terpencil, kekurangan fasilitas penyimpanan pangan seperti cold storage atau gudang berpendingin, yang dibutuhkan untuk menjaga kualitas bahan segar dan mencegah pembusukan selama distribusi. Hal ini diungkapkan dalam analisis (Herdiana, 2025), yang mencatat bahwa rantai distribusi bahan makanan lokal belum sepenuhnya didukung oleh infrastruktur yang layak, sehingga daging, sayur, atau produk segar lainnya mudah rusak sebelum sampai di sekolah. Keterbatasan ini memperlemah efektivitas MBG karena bisa menyebabkan kerugian logistik, pemborosan bahan makanan, dan menurunnya kualitas gizi yang disajikan.

c. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Tidak semua daerah memiliki SDM yang mumpuni dalam merencanakan menu gizi, melakukan pengawasan kualitas makanan, atau menjalankan prosedur operasional MBG. Menurut studi Agustini (2025), beberapa sekolah dan dinas lokal menghadapi kesulitan dalam menyiapkan menu yang seimbang karena kurangnya tenaga ahli gizi atau staf yang memahami gizi sekolah. Selain itu, dalam studi *Analisis Kritis terhadap Efektivitas Kebijakan Makanan Bergizi Gratis* oleh (Azira et al., 2025), penulis menunjukkan bahwa sistem pengawasan di dapur sekolah sering lemah karena pengelola dapur kekurangan pelatihan dan perhatian dari pemangku kebijakan. Keterbatasan SDM

ini dapat menurunkan kualitas makanan yang disajikan, meningkatkan risiko pelanggaran higienitas, dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap program MBG.

d. Variasi Kapasitas Fiskal Daerah

Setiap daerah tidak memiliki kemampuan fiskal yang setara untuk mendukung operasional MBG. Dalam survei implementasi, Herdiana (2025) mencatat bahwa sebagian kabupaten atau kota tergantung pada alokasi dari pusat karena pendapatan asli daerah (PAD) mereka rendah, sehingga sulit menanggung biaya transportasi, penyimpanan, dan pengolahan makanan secara berkelanjutan. Ketergantungan ini menciptakan risiko keberlanjutan program jika dukungan pusat berkurang atau jika ada fluktuasi anggaran lokal. Selain itu, perbedaan kapasitas fiskal antar daerah juga bisa menyebabkan ketimpangan dalam kualitas layanan MBG, di mana daerah kaya mampu menyediakan menu bergizi lebih baik dibandingkan daerah miskin.

e. Komunikasi Kebijakan dan Ketidakseragaman SOP

Beberapa literatur menyoroti bahwa hambatan implementasi MBG berakar dari komunikasi kebijakan yang tidak merata dan SOP yang belum seragam di semua wilayah. Dalam studi provinsi Malang, sebuah artikel menemukan bahwa perbedaan interpretasi kebijakan di level lokal membuat mekanisme pelaksanaan MBG bervariasi antar sekolah dan dinas (Febryanti et al., 2025). Sementara itu, Saniyah dkk. (2025) dalam *Jurnal Pendidikan Tambusai* menyoroti bahwa tata kelola program masih lemah karena SOP teknis dan kebijakan implementasi belum konsisten dan diaplikasikan secara merata. Ketidakseragaman ini menimbulkan kebingungan pelaksana lokal dan mengakibatkan dosa efisiensi dan efektivitas operasional.

Tantangan-tantangan tersebut sangat relevan dengan kajian teoritis tentang Local Economic Development (LED) dan peran pemerintah daerah. Fragmentasi kewenangan dan kapasitas fiskal yang berbeda antar daerah menunjukkan bahwa kelembagaan lokal belum sepenuhnya terintegrasi dan belum mampu menciptakan ekosistem yang produktif, sebagaimana ditekankan dalam teori LED bahwa kelembagaan lokal yang kuat dan terkoordinasi adalah pilar utama pembangunan ekonomi lokal. Selanjutnya, keterbatasan SDM dan infrastruktur menggambarkan bahwa potensi lokal (endogenous development) untuk menyerap manfaat program seperti MBG belum optimal karena kelemahan struktural. Tanpa perbaikan kelembagaan dan dukungan sumber daya yang memadai, potensi MBG sebagai instrumen ganda (social + ekonomi) sulit direalisasikan secara penuh.

Dampak Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Pembangunan Ekonomi Lokal

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki dampak ekonomi yang signifikan di tingkat lokal. Meskipun tujuan utama program ini adalah peningkatan kualitas gizi serta kapasitas belajar siswa, implementasinya menciptakan *lingkungan ekonomi baru* yang menggerakkan rantai pasok pangan lokal, meningkatkan aktivitas UMKM, dan memproduksi efek pengganda (*multiplier effect*) pada wilayah pelaksana.

Peningkatan Permintaan Komoditas Lokal

Program MBG membutuhkan pasokan bahan makanan harian dalam jumlah besar dan stabil. Kebutuhan ini menciptakan pasar baru yang spesifik untuk komoditas lokal seperti sayur-mayur, telur, daging ayam, ikan, dan buah-buahan. Menurut Widyasari et al. (2025), MBG memberikan peningkatan permintaan terukur terhadap komoditas pertanian lokal sehingga membuat rantai pasok di tingkat desa lebih hidup karena sekolah membutuhkan suplai bahan segar setiap hari. Mereka menemukan bahwa daerah yang mengintegrasikan petani lokal ke dalam sistem pasokan MBG mengalami:

- a. meningkatnya jumlah panen yang dibeli sekolah,
- b. stabilnya pasar bagi petani kecil,
- c. peningkatan pendapatan petani dan pemasok bahan makanan.

Peningkatan permintaan ini bersifat *harian* dan *kontinu*, yang berarti pasar yang tercipta lebih stabil dibandingkan pasar terbuka biasa. Situasi ini memberikan dorongan bagi petani untuk mengoptimalkan kuantitas dan kualitas produksi pertanian. MBG juga mendorong munculnya kelompok tani baru dan pola tanam yang lebih terencana karena sekolah membutuhkan komoditas dalam jumlah tertentu setiap minggu.

Pelibatan UMKM dan Dapur Lokal

Program MBG membuka peluang keterlibatan UMKM lokal, terutama UMKM catering, pengolahan pangan, dan usaha rumahan yang memproduksi lauk-pauk, sayuran olahan, serta makanan tambahan bergizi lainnya. Andriyanty et al. (2025) menyatakan bahwa keterlibatan UMKM dalam rantai pasok MBG berpotensi meningkatkan sektor makanan siap saji. Mereka menemukan bahwa UMKM yang bermitra dengan instansi pemerintah melalui program makan bergizi mengalami:

- a. Peningkatan volume produksi hingga 20–40% per bulan dalam fase awal,
- b. Peningkatan omset yang stabil karena adanya permintaan terjamin dari sekolah,
- c. Peningkatan kualitas manajemen seperti pencatatan keuangan, kebersihan dapur, dan standar gizi.

Keterlibatan UMKM bukan hanya memberikan mereka pasar tetap, tetapi membuat UMKM naik kelas karena harus memenuhi standar kebersihan, nutrisi, dan kapasitas produksi yang disyaratkan dalam MBG. Hal ini secara langsung meningkatkan daya saing UMKM daerah.

Selain UMKM catering, beberapa daerah bahkan membentuk Dapur Komunitas (Community Kitchen) yang dikelola oleh kelompok ibu rumah tangga, yang berfungsi menyediakan makanan harian bagi sekolah. Model ini menciptakan lapangan kerja informal dengan pendapatan yang stabil.

Multiplier Effect Ekonomi

Efek pengganda (*multiplier effect*) adalah dampak lanjutan dari adanya peningkatan permintaan barang dan jasa akibat sebuah program pemerintah. MBG menciptakan efek pengganda yang signifikan pada berbagai lapisan ekonomi lokal. Basit & Ramadani (2025) menjelaskan bahwa ketika pemerintah membeli komoditas lokal secara rutin, pendapatan lokal meningkat, dan peningkatan pendapatan tersebut mendorong masyarakat membelanjakan uang kembali ke sektor ekonomi lainnya seperti ritel, transportasi, dan jasa. Dalam konteks MBG, terdapat tiga efek pengganda utama:

a. Multiplier Effect pada Petani

1. Petani yang pendapatannya meningkat → membeli lebih banyak sarana produksi (bibit, pupuk).
2. Belanja mereka kembali ke pasar lokal → memperkuat putaran ekonomi desa.
3. Produksi yang meningkat memicu terbukanya peluang kerja pada sektor pertanian.

b. Multiplier Effect pada UMKM

1. UMKM catering mempekerjakan tenaga baru sebagai juru masak, pengemas, dan pengantar makanan.
2. Peningkatan produksi menstimulasi permintaan bahan produksi dari toko ritel lokal.
3. UMKM menjadi lebih bankable karena memiliki pemasukan tetap, membuka peluang pembiayaan dari koperasi atau bank.

c. Multiplier Effect pada Rumah Tangga

1. Ibu rumah tangga yang bekerja di dapur sekolah menerima pendapatan tambahan.
2. Pendapatan ini dibelanjakan kembali di pasar lokal → meningkatkan aktivitas ekonomi lintas sektor.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mampu berkontribusi pada peningkatan kualitas gizi siswa sekaligus mendorong aktivitas ekonomi lokal melalui keterlibatan petani, UMKM, dan dapur komunitas sebagai bagian dari rantai pasok. Temuan ini memperlihatkan bahwa MBG dapat berperan sebagai instrumen sosial-ekonomi yang memberikan dampak positif bagi masyarakat, meskipun efektivitasnya masih sangat ditentukan oleh kapasitas kelembagaan daerah, kesiapan sarana distribusi, serta konsistensi implementasi lintas sektor. Berdasarkan hasil tersebut, disarankan agar pemerintah daerah memperkuat koordinasi antar dinas, meningkatkan kapasitas pelaku lokal, serta memastikan ketersediaan infrastruktur pendukung agar program ini dapat dijalankan secara lebih merata dan berkelanjutan. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya mengandalkan studi kepustakaan sehingga belum mampu menggambarkan variasi kondisi empiris di setiap daerah oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menerapkan pendekatan lapangan atau analisis kuantitatif untuk mengukur dampak ekonomi program secara lebih terperinci dan mengidentifikasi faktor implementasi yang paling berpengaruh dalam konteks lokal yang berbeda.

DAFTAR REFERENSI

- Agustini, U. (2025). Efektivitas dan tantangan kebijakan program makan bergizi gratis sebagai intervensi pendidikan di Indonesia. *Jurnal Kiprah Pendidikan*, 4(3), 362–368. <https://doi.org/10.33578/kpd.v4i3.p362-368>
- Albaburrahim, A., Putikadyanto, A. P. A., Efendi, A. N., Alatas, M. A., Romadhon, S., & Wachidah, L. R. (2025). Program makan bergizi gratis: Analisis kritis transformasi pendidikan Indonesia menuju Generasi Emas 2045. *Entita: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 767–780. <https://doi.org/10.19105/ejpis.v1i.19191>
- Andriyanty, R. (2025). Kebijakan makan bergizi gratis (MBG): Bagaimana pengaruhnya terhadap kesejahteraan petani. *Jurnal Kebijakan*, 12(2). <https://doi.org/10.29244/jkebijakan.v12i2.66225>
- Anfa, N. S., & Bintariningtyas, S. (2024). Kemiskinan, pendidikan, pengangguran, dan disparitas pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 22(1), 57. <https://doi.org/10.20961/jiep.v22i1.88606>
- Azira, N., Lestari, T., Diliarosta, S., Alam, I. P., & Padang, U. N. (2025). Pengaruh model problem based learning terintegrasi etnosains terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas VII di SMPN 4 Payakumbuh. *Jurnal Pendidikan*, 9, 24009–24016.

- Basit, M., & Ramadani, H. (2025). Analisis implementasi program makan bergizi gratis terhadap perkembangan ekonomi. *Journal of Economics Development Research*, 1(2), 49–54. <https://doi.org/10.71094/joeder.v1i2.105>
- Febryanti, I., Pane, M. A., Astuti, P., & Fakultas Administrasi dan Bisnis. (2025). Implementasi kebijakan makan bergizi gratis (MBG): Studi kasus pada SDN 3 Kepanjen Kabupaten Malang. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(1), 67–79. <https://doi.org/10.14710/dialogue.v7i1.26628>
- Fernia, M. E. (2025). Pengembangan ekonomi lokal menggunakan konsep green economy di Kota Mojokerto. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5(3), 167–186.
- Herdiana, D. (2025). Implementasi kebijakan makan bergizi gratis (MBG): Faktor-faktor pendorong dan penghambat. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(2), 470–477.
- Herniati, N., & Idawati. (2025). Efektivitas program pemerintah MBG (makan bergizi gratis) terhadap minat belajar anak usia dini. *Jurnal Pendidikan Aura*, 6(1), 88–98. <https://doi.org/10.37216/aura.v6i1.2484>
- Hidayat, I. F. (2025). Analisis aksesibilitas pangan rumah tangga pedesaan (studi kasus Desa Girimulyo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang). *Jurnal Pembangunan Wilayah*, 9, 317–326.
- Imaningsih, M. W. (n.d.). *Ekonomi pembangunan: Kajian teori dan studi empiris*.
- Maharaksa, M. S., Triharjono, H. D., Fadilah, F. N., Solihat, S. A. Z. K., Firda, S. M., & Hidayat, Z. A. (2025). Implementasi kebijakan publik: Pengertian, model-model, dan penerapannya dalam studi kasus. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(6), 69–73.
- Moehaditoyo, S. H. (2009). Pembangunan ekonomi lokal di era otonomi daerah. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen*, 5. <https://doi.org/10.30996/die.v5i3.75>
- Nuradhawati, F. (2025). Program makan bergizi gratis sebagai strategi bela negara dalam meningkatkan ketahanan nasional. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 2(1), 123–135.
- Pramono, J. (2020). Implementasi dan evaluasi kebijakan publik. *Kebijakan Publik*, 21(2), 1–144.
- Rahmah, H. A., Anggraini, A., Nilasari, Y. P., & Salsabilla, E. P. (2025). Analisis efektivitas program makan bergizi gratis di sekolah dasar Indonesia tahun 2025. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(2), 2855–2866.
- Rosidin, A., Maulana, J., & Dharmawan, A. (2025). Tantangan dan strategi implementasi program makan bergizi gratis: Studi kasus Pemerintah Daerah Provinsi Banten. *Jurnal Hukum dan Administrasi Publik*, 3(2), 131–143.
- Sunarto, S. (2021). Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang kearsipan pada lembaga layanan pendidikan tinggi wilayah II. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 3(2), 97–112. <https://doi.org/10.48093/jiask.v3i2.50>

- Wayan Lendra, D. H. (2025). Kebijakan makan bergizi gratis dan relevansinya terhadap nilai-nilai sosial. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(1). <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i1.1252>
- Widyasari, S. Y., Larasati, A., & Alam, W. Y. (2025). Evaluasi kebijakan makan bergizi gratis di sekolah dasar: Implikasi terhadap kesehatan anak dan pemberdayaan ekonomi lokal. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(4), 1727–1736.
- Wijayanti, S. S., & Darwanto, D. (2024). Implementasi pengembangan ekonomi lokal melalui pembentukan klaster di Kabupaten Semarang. *EcceS: Economics Social and Development Studies*, 3(1), 14–23.
- Yusri, M. (2020). Analisis deskriptif pengembangan ekonomi lokal (PEL) dan kaitannya dengan pengembangan wilayah berkelanjutan. *Journal Sosial Humaniora Komunikasi*, 9, 1689–1699.
- Zahara, N. R., & Mayesti, N. (2024). Implementasi kebijakan Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2021 pada fungsi kearsipan Sekretariat Ditjen Kementerian X RI. *Jurnal Ilmu Informasi, Perpustakaan, dan Kearsipan*, 26(1). <https://doi.org/10.7454/jipk.v26i1.1103>